

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dilapangan terkait dengan pariwisata halal di Lombok maka dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dispar NTB dan para stakeholder telah melakukan beberapa proses dalam menjalankan pariwisata halal di Lombok. Proses tersebut antara Starting condition dalam hal ini Pemerintah daerah memberikan suatu gagasan awal terkait pariwisata halal dan direspon oleh para stakeholder termasuk swasta dan masyarakat. Kepemimpinan fasilitatif dalam hal ini pemerintah daerah mencoba memberikan dan memfasilitasi kebutuhan dari program pariwisata halal kepada para stakeholder, sedangkan swasta merespon kebijakan pariwisata halal, serta masyarakat mencoba untuk mengkomunikasikan kebutuhan dan potensi pokdarwis kepada pemerintah.

Desain institusional dalam hal ini pemerintah daerah atau Dispar NTB menggunakan dasar kebijakan perda no 2 tahun 2016 sebagai acuan dalam program pariwisata halal, sedangkan swasta berperan untuk memenuhi standar dari aturan tersebut dalam bentuk sertifikasi halal dari MUI terkait dengan fasilitas yang disediakan, dan masyarakat merespon aturan tersebut untuk dijadikan dasar dalam mengelola pariwisata halal, namun dilapangan pemerintah kurang merespon terkait potensi yang bisa dikembangkan. Proses kolaborasi dalam hal ini Dinas pariwisata NTB melakukan pertemuan dengan para stakeholder untuk

membahas mengenai implementasi dari perda n0 2 tahun 2016 terkait dengan pariwisata halal. Selanjutnya Dinas pariwisata NTB melakukan musyawarah untuk membahas perda tersebut terkait peluang dan potesi yang didapatkan pada setiap stakeholder sehingga setiap stakeholder yang terlibat terjalin kerjasama dan sikap saling percaya. Tahap terakhir yaitu Pemerintah daerah dan semua stakeholder menggali potensi yang bisa dikembangkan sebagai salah satu produk pariwisata halal.

Saran

1. Memperjelas aturan dasar yang digunakan dalam proses kolaborasi agar bisa diterapkan pada kondisi pariwisata halal yang ideal.
2. Menggali dan mengembangkan potensi daerah yang bisa berspotensi dalam memajukan pariwisata halal.
3. Meningkatkan koordinasi dengan para stakeholder agar program pariwisata halal berjalan dengan maksimal.
4. Pemerintah Daerah diharapkan meningkatkan koordinasi dengan melibatkan pihak aparat keamanan dalam menjaga kenyamanan wisatawan
5. Pemerintah Daerah dan para stakeholder yang menjalankan pariwisata halal diharapkan meningkatkan koordinasi dengan Dinas kebersihan akan memberikan fasilitas terkait dengan kebersihan yang ada di obyek wisata.